



Strategi Pemerintah Kabupaten Buton: Colaborative Governance Dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah

Wa Ode Sarsinah¹⁾, Herman Lawelai²⁾, L.M. Azhar Sa'ban³⁾

Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

waodesarsina729@gmail.com¹⁾, lawelaiherman@gmail.com²⁾, izharrazi@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Buton dalam menanggulangi anak putus sekolah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal yang memicu kolaborasi dalam penanggulangan anak putus sekolah meliputi faktor sosial ekonomi keluarga, akses pendidikan, dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, keberhasilan kolaborasi didukung oleh kebijakan pendidikan daerah, program penanganan anak putus sekolah, serta mekanisme koordinasi antar lembaga. Kepemimpinan pemerintah daerah dan koordinasi dinas pendidikan juga berperan penting dalam memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan. Proses kolaborasi diwujudkan melalui dialog antar stakeholder serta implementasi berbagai program pendidikan yang melibatkan pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan collaborative governance menjadi strategi penting dalam meningkatkan akses pendidikan serta menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Buton.

Kata kunci: Collaborative Governance, Anak Putus Sekolah, Kebijakan Pendidikan Daerah, Akses Pendidikan, Kolaborasi Stakeholder Pendidikan.

Abstract

This study aims to analyze the Buton Regency Government's strategy in addressing school dropouts through collaboration between the local government, education office, schools, and the community. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the initial conditions that trigger collaboration in addressing school dropouts include family socioeconomic factors, access to education, and public awareness of education. In addition, the success of collaboration is supported by regional education policies, programs for addressing school dropouts, and inter-agency coordination mechanisms. Local government leadership and coordination within the education office also play a crucial role in facilitating cooperation between stakeholders. The collaboration process is realized through dialogue between stakeholders and the implementation of various education programs involving the government, schools, and the community. Thus, the implementation of collaborative governance is an important strategy in increasing access to education and reducing the number of school dropouts in Buton Regency.

Keywords: Collaborative Governance, School Dropouts, Regional Education Policy, Access to Education, Collaboration among Education Stakeholders.

PENDAHULUAN

Masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pendidikan, yang merupakan komponen vital dari eksistensi (Setyawan, 2025). Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk pertumbuhan, memberikan sekolah lingkungan formal untuk mempelajari aspek eksistensi manusia yang telah banyak dieksplorasi baik dalam ranah teoritis maupun praktis (Syaadah et al.,

2023). Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pendidikan.” Demikian pula, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas akses yang sama terhadap pendidikan yang memadai dan berkualitas tinggi, tanpa memandang status hukumnya” (Limbong et al., 2025). Sektor pendidikan mewujudkan salah satu cita-cita nasional, yaitu mendidik bangsa (Supriarno, 2024). Pasal 34 ayat (1-3) menyatakan bahwa: 1) Setiap warga negara yang berusia enam tahun atau lebih berhak untuk mengikuti pendidikan wajib; 2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pelaksanaan pendidikan wajib, setidaknya pada tingkat dasar, tanpa biaya; dan 3) negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan wajib melalui lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat (Khairunnisa, 2018).

Klausul ini menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan, dan keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada upaya bersama semua pihak terkait (Muhammad Ghoris Arkan Mahasina, Endin Mujahidin, 2025). Seluruh warga hendaknya memprioritaskan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan di berbagai bidang, termasuk sosial, budaya, dan ekonomi (Norul Hikmah, 2025). Sepanjang sejarah pendidikan, selalu ada kasus anak-anak yang putus sekolah. Peningkatan sumber daya manusia merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga, yang membuat masalah ini meluas dan sulit dipecahkan (Supriatna, 2023). Sementara itu, karena semua solusi yang dibutuhkan bergantung pada kondisi makroekonomi negara, kebijakan pemerintah sangat penting dalam menangani semua masalah, termasuk kemajuan sosial (Almas Ressel Ulia, Salahudin Rayyan, 2024).

Meskipun tingkat pendidikan penduduk meningkat, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan (Endry Setiawan, Ninik Handayani, Ranto Setiyono, Hermansyah, Ahmad, 2024). Akses yang memadai terhadap pendidikan masih menjadi masalah bagi banyak kelompok masyarakat. Karena pendidikan adalah hak yang dimiliki semua warga negara, maka tidak bermoral untuk menolak akses pendidikan bagi kelompok mana pun dalam masyarakat (Risman Setiawan, Lade Sirjon, Fuad Nur, The Ode of Muhamad Sulihin, The Ode of Muhammad Taufiq Afoeli, Arfa, 2025). Keadaan orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi. Banyak anggota kelas menengah ke bawah di negara kita meninggalkan pendidikan mereka karena ketidakpastian ekonomi (Muhammad Yasin, Akhmad Rifansyah, 2024).

Tabel 1.

Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun Akademik Tahun Akademik 2024/2025							
Pesertas	I	II	III	IV	V	VI	Jumlah
Didik	19.902	4.591	3.187	3.118	4.573	3.169	38.540
Putus Sekolah Dasar							

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi 2024/2025

Tabel 2.

Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah Menengah Pertama Tingkat Nasional Tahun Akademik 2024/2025				
Pesertas Didik Putus Sekolah Menengah Pertama	VII	VIII	IX	Jumlah
	5.571	3.418	3.230	12.219

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi 2024/2025

Tabel 3.

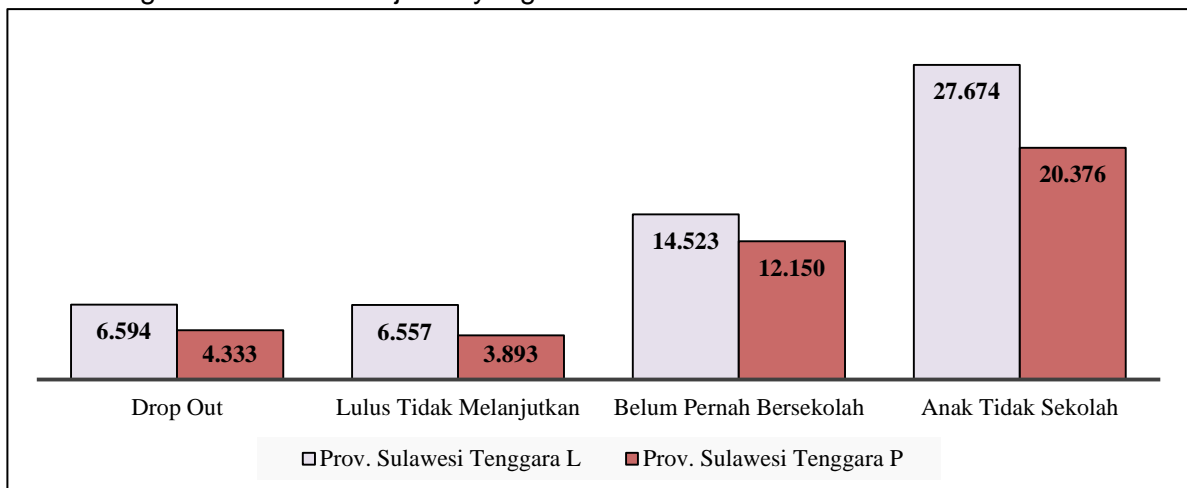
Jumlah Peserta Didik Tingkat Nasional Putus Sekolah Menengah Atas Tahun Akademik 2024/2025				
Peserta Didik Putus Sekolah Menengah Atas	X	XI	XII	Jumlah
	3.133	1.466	2.117	6.716

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi 2024/2025

Menurut (Endang Susilawati, Getar Rahmi Pratiwi, 2021), pendidikan merupakan salah satu faktor paling penting dalam proses pembangunan suatu negara. Jika suatu bangsa memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, warganya pun harus memiliki tingkat peradaban dan sikap yang tinggi. Tingkat pendidikan suatu bangsa memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerjanya; di Indonesia, misalnya, terdapat beberapa masalah terkait pendidikan, seperti putus sekolah (Mochamad Taufik Nurul Hidayat, Ade Irfan Abdurrahman, 2024). Setiap warga negara memiliki hak mendasar atas pendidikan, yang juga merupakan alat yang berguna untuk mengembangkan sumber daya manusia (Jeni Suharti, 2025). Kemampuan sistem pendidikan untuk mempertahankan siswa hingga menyelesaikan tingkat pendidikan yang ditempuh merupakan indikator lain dari efektivitas pengembangan pendidikan, di samping tingkat partisipasi sekolah (Awaluddin, 2021). Dalam hal ini, angka putus sekolah terus menjadi masalah utama di banyak lokasi, terutama yang memiliki faktor geografis dan sosial yang beragam (Noerdars, 2025).

Putus sekolah menunjukkan kekurangan sistemik dalam tata kelola pendidikan regional di samping masalah pribadi atau keluarga (Nurul Hasana Aswar, Ahmad Mustanir, 2025). Kemungkinan putus sekolah meningkat karena sejumlah variabel yang saling terkait, termasuk kemiskinan, akses fisik yang terbatas ke sekolah, kualitas layanan pendidikan yang buruk, dan penegakan hukum pendidikan wajib yang lemah (Maharani et al., 2024). Keadaan ini menunjukkan perlunya pemahaman menyeluruh tentang masalah putus sekolah di semua wilayah dan tingkat pemerintahan.

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak dalam konteks pendidikan yang terdesentralisasi. Kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota. Namun, situasi aktual menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam keberhasilan menurunkan angka putus sekolah antar lokasi (Wulandari et al., 2025). Bahkan di dalam provinsi yang sama, kesenjangan dalam kemampuan anggaran, kualitas tata kelola, dan komitmen kebijakan mengakibatkan hasil yang tidak konsisten. Situasi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana kebijakan dan inisiatif pendidikan regional dapat berhasil mengatasi masalah putus sekolah (Anam & Wiyono, 2025). Menemukan tren, ketidaksetaraan, dan elemen kunci yang memengaruhi prevalensi putus sekolah memerlukan analisis di tingkat provinsi, distrik, dan kota (Nurul Jannah, Aswasulasikin, 2025). Selain mengidentifikasi wilayah dengan tingkat risiko tinggi, pendekatan lintas wilayah menawarkan ringkasan inisiatif kebijakan yang relatif lebih efektif.



Gambar 1.
Total Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2025

Sumber: data.kemendikdasmen.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan pendidikan adalah masyarakat dan pemerintah berbagi tanggung jawab, dan keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada upaya terkoordinasi yang dilaksanakan dengan cara yang selaras dengan unsur-unsur terkait. Mengingat bahwa pendidikan sangat penting bagi seluruh warga negara dan merupakan sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong pertumbuhan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan bidang lainnya (Dince Putri Juita, Priya, Mayang Azwardi, 2024).

Sejauh ini, penelitian tentang siswa putus sekolah cenderung berfokus pada karakteristik individu siswa atau variabel ekonomi rumah tangga. Fungsi tata kelola pendidikan regional dan variasi kebijakan regional belum dijelaskan secara memadai dengan metode ini, meskipun hal itu sangat penting. Pada kenyataannya, hambatan terhadap pendidikan dapat diciptakan atau dihilangkan sebagian besar oleh kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dan kebijakan publik.

Program pendidikan wajib pemerintah, yang telah berlaku sejak tahun 1994, merupakan langkah pertama menuju pencapaian kesetaraan dan keadilan di tingkat pendidikan. Awalnya wajib selama enam tahun (usia tujuh hingga dua belas tahun), kemudian diperpanjang menjadi sembilan tahun (usia tujuh hingga lima belas tahun), dan pada tahun 2015 sekali lagi ditingkatkan menjadi dua belas tahun (usia tujuh hingga delapan belas tahun) dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (Luci Dian Andayani, Muhamad Yusuf, Mambang, 2021). Namun, jelas bahwa masalah putus sekolah masih berlanjut di Kabupaten Buton khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Menurut statistik dari kemendikdasmen.go.id, seribu anak usia sekolah di Kabupaten Buton tidak terdaftar di sekolah atau telah diklasifikasikan sebagai ATS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) oleh Kementerian Pendidikan. Meskipun topik putus sekolah bukanlah hal baru, namun sangat penting untuk diperdebatkan karena secara langsung memengaruhi kemajuan suatu bangsa, budaya, dan negara (Ahmad Yaneri, Nike Vonika, 2022).

Tabel 4.

Data Anak Belum Pernah Besekolah Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Tahun 2025

Kecamatan	Usia				Total
	<7	7 sd 12	13 sd 15	>15	
Lasalimu	0	21	19	83	123
Pasar Wsajo	0	53	52	183	288
Kapontori	0	16	24	103	143
Lasalimu Selatan	0	33	36	104	173
Siontapina	0	36	48	156	240
Wolowa	0	15	7	37	59
Wabula	0	9	12	40	61

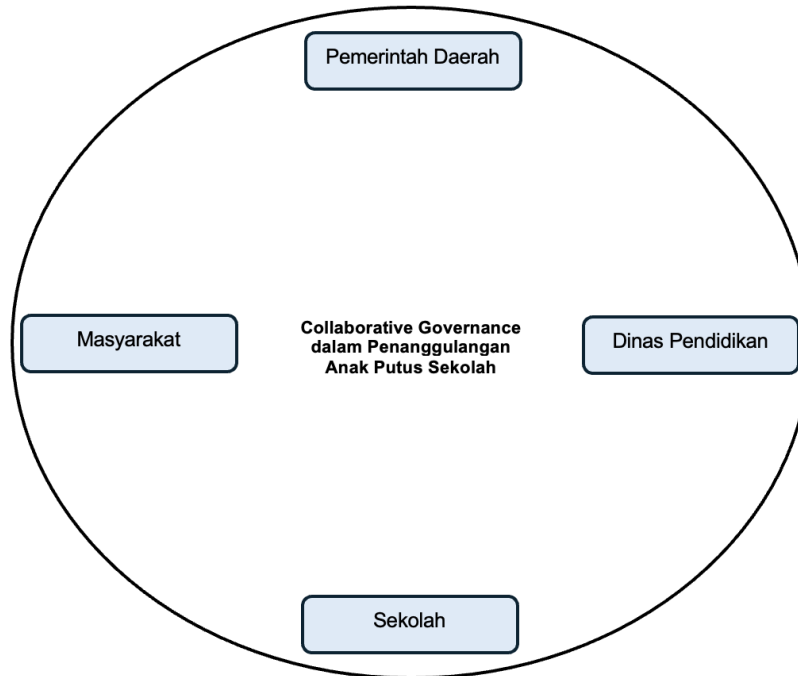
Sumber: data.kemendikdasme.go.id

Tingkat putus sekolah di Kabupaten Buton masih merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih. Putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari fasilitas pendidikan yang tidak memadai hingga masalah sosial dan ekonomi. Pertimbangan ekonomi sangat penting, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang tidak mampu membayar pendidikan anak-anak mereka. Di tempat yang sulit dijangkau dengan mobil, akses pendidikan yang terbatas juga menjadi masalah penting. Beberapa keluarga mungkin lebih memprioritaskan pekerjaan atau pekerjaan rumah tangga daripada pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, banyak orang terutama di masyarakat tradisional tidak memahami nilai pendidikan formal.

Penelitian tentang bagaimana pemerintah menangani masalah putus sekolah sangat penting mengingat konsekuensi jangka panjang dari putus sekolah. Kurangnya peluang kerja dan kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan kejahatan hanyalah dua dari sekian banyak masalah yang diperkirakan akan dihadapi oleh anak-anak yang putus sekolah di masa depan (Limbong et al., 2025). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami masalah ini dan menciptakan solusi praktis. Penelitian ini juga akan memberikan ringkasan kegiatan Pemerintah Kabupaten Buton dan efektivitasnya.

METODE

Teknik penelitian adalah suatu proses yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi, yang kemudian diproses dan dievaluasi secara metodis dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif untuk menyelidiki collaborative governance dalam penanggulangan anak putus sekolah di Kabupaten Buton. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan melaporkan opini mendalam dari sumber informan, melakukan penelitian di lingkungan alami, dan mengembangkan gambaran lengkap dan kompleks yang dapat diungkapkan dengan kata-kata (Fadli, 2021). Variable penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Collaborative Governance dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Buton

Tabel 5.
Variabel penelitian

Variabel	Konteks Penelitian	Sub Variabel
Kondisi awal yang memicu kolaborasi	Tingginya anak putus sekolah di Kabupaten Buton	Kondisi sosial ekonomi keluarga Akses pendidikan Kesadaran Masyarakat terhadap pendidikan
Aturan dan mekanisme kolaborasi	Kebijakan Pendidikan daerah dan program penanganan ATS	Kebijakan Pendidikan daerah Program Penanganan anak putus sekolah Mekanisme koordianasi antar lembaga
Kepemimpinan yang memfasilitasi kolaborasi	Peran pemerintah daerah dan dinas pendidikan	Peran pemerintah daerah Koordinasi dinas pendidikan
Proses interaksi antar stakeholder	Koordinasi pemerintah, sekolah dan masyarakat	Dialog antar stakeholder Implementasi program kolaborasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

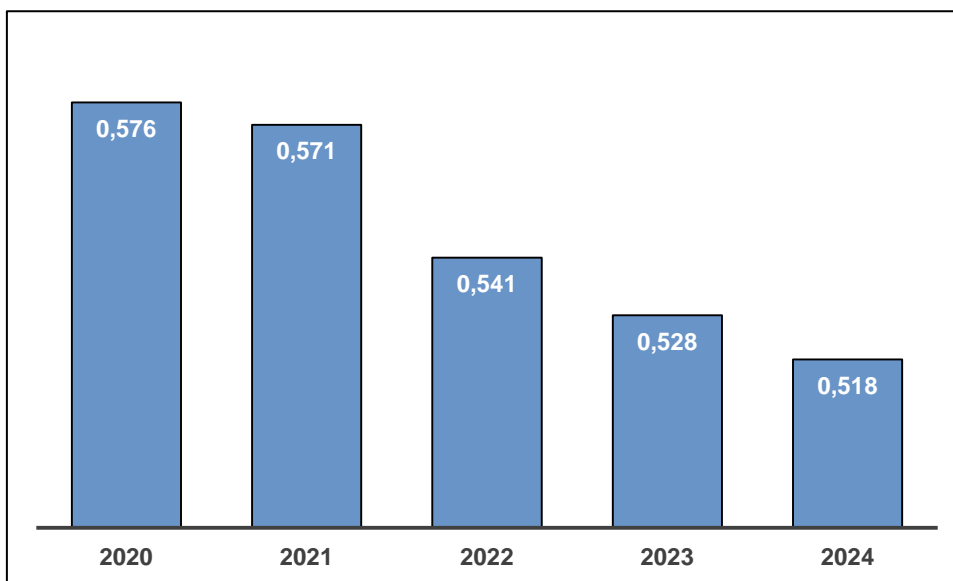
1. Kondisi awal yang memicu kolaborasi

Dari sudut pandang tata kelola kolaboratif, keadaan awal yang menyebabkan terbentuknya kemitraan tersebut berdampak pada keberhasilannya. Untuk mendorong pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dalam menyelesaikan masalah masyarakat, beberapa prasyarat sangat penting. Menurut penelitian ini, keadaan sosial ekonomi keluarga, akses pendidikan, dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan merupakan tiga faktor utama yang memicu kerja sama dalam mengatasi masalah putus sekolah di Kabupaten Buton.

a) Kondisi sosial ekonomi keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu penyebab utama anak usia sekolah di Kabupaten Buton. Terdapat banyak keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu yang menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya transportasi, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya. Situasi ini mengakibatkan anak terpaksa berhenti sekolah dan memaksa semua orang untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi sosial, dalam upaya melindungi anak usia sekolah.



Gambar 3.

Gini Ratio Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Dari segi ekonomi, kesenjangan yang terjadi dapat dilihat dari angka gini ratio. Gini Ratio merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, sementara nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi.

Gini Ratio Kabupaten Buton pada periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan menggambarkan membaiknya Tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat. Pada tahun 2020, nilai Gini Ratio berada pada angka 0,576 dan sedikit menurun menjadi 0,571 pada 2021. Kedua angka ini masih mencerminkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi, di mana distribusi pendapatan belum merata dan terdapat kesenjangan antara kelompok penduduk berpendapatan tinggi dan rendah. Namun, perubahan mulai terlihat lebih signifikan pada tahun 2022 ketika Gini Ratio turun menjadi 0,541. Penurunan ini dapat mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pemerataan ekonomi, seperti program pemberdayaan masyarakat, dukungan UMKM, serta peningkatan akses terhadap pekerjaan produktif, mulai menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini merupakan sinyal positif bahwa struktur ekonomi daerah mulai bergerak menuju pemerataan yang lebih baik.

Tren penurunan Gini Ratio semakin menguat pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing

menjadi 0,528 dan 0,518. Penurunan ini menggambarkan peningkatan kesejahteraan yang relatif merata di berbagai kelompok pendapatan di Kabupaten Buton. Artinya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi mulai menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas. Penurunan ketimpangan ini juga dapat dihubungkan dengan meningkatnya akses penduduk terhadap kesempatan kerja, program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, UMKM, dan perdagangan lokal. Selain itu, membaiknya akses terhadap layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sehingga memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah maupun antarkelompok sosial. Tren Gini Ratio yang terus menurun menunjukkan bahwa Kabupaten Buton berada dalam jalur yang baik menuju pembangunan yang lebih inklusif.

Dari perspektif pembangunan manusia, penurunan Gini Ratio memiliki hubungan kuat dan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton. Ketimpangan yang menurun memungkinkan lebih banyak masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan, baik dalam bentuk pendapatan, akses kesehatan, pendidikan, maupun kualitas lingkungan sosial. Ketika pendapatan semakin merata, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk gizi, pendidikan anak, dan akses layanan kesehatan—meningkat, sehingga berdampak positif pada seluruh dimensi IPM: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

b) Akses pendidikan

Akses pendidikan juga menjadi faktor yang memengaruhi tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Buton. Beberapa wilayah memiliki kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, sehingga jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah relatif jauh. Keterbatasan sarana transportasi serta infrastruktur pendidikan yang belum merata turut menjadi hambatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek geografis dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

c) Kesadaran Masyarakat terhadap pendidikan

Selain faktor ekonomi dan akses pendidikan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan formal bagi masa depan anak. Dalam beberapa kasus, anak lebih diprioritaskan untuk membantu pekerjaan keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan anak putus sekolah tidak hanya memerlukan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

2. Aturan dan mekanisme kolaborasi

Dalam kerangka teori Collaborative Governance, desain kelembagaan merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan proses kolaborasi. Desain kelembagaan mengacu pada aturan, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur hubungan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Dalam penelitian ini, desain kelembagaan dalam penanggulangan anak putus sekolah di Kabupaten Buton tercermin melalui kebijakan pendidikan daerah, program penanganan anak putus sekolah, serta mekanisme koordinasi antar lembaga.

a) Kebijakan Pendidikan daerah

Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Kebijakan tersebut mengacu pada program pendidikan nasional seperti program wajib belajar 12 tahun yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buton melalui dinas pendidikan berupaya memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dasar dan menengah.

Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai intervensi dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah.

Selain itu, kebijakan pendidikan daerah juga diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan, dukungan terhadap sekolah, serta berbagai program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka anak putus sekolah serta meningkatkan partisipasi pendidikan di Kabupaten Buton.

b) Program Penanganan anak putus sekolah

Dalam upaya menanggulangi anak putus sekolah, pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai program pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Program tersebut antara lain berupa upaya pendataan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta upaya mendorong anak yang telah putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan.

Program penanganan anak putus sekolah juga dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mengidentifikasi anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan yang diperlukan agar anak-anak yang mengalami hambatan ekonomi maupun sosial dapat kembali memperoleh akses pendidikan.

c) Mekanisme koordianasi antar lembaga

Mekanisme koordinasi antar lembaga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan anak putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Buton tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti dinas pendidikan, sekolah, serta masyarakat.

Koordinasi antar lembaga dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi dan kerja sama dalam pelaksanaan program pendidikan. Pemerintah daerah berperan sebagai koordinator utama yang memfasilitasi kerja sama antar aktor, sehingga setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara optimal. Melalui koordinasi yang baik, berbagai program penanggulangan anak putus sekolah dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan efektif.

3. Kepemimpinan yang memfasilitasi kolaborasi

Dalam model collaborative governance, kepemimpinan fasilitatif berperan sebagai penggerak utama yang mengarahkan proses kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Kepemimpinan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menciptakan kerja sama yang efektif antar lembaga. Dalam penelitian ini, kepemimpinan yang memfasilitasi kolaborasi dalam penanggulangan anak putus sekolah di Kabupaten Buton dapat dilihat melalui dua aspek utama, yaitu peran pemerintah daerah dan koordinasi dinas pendidikan.

a) Peran pemerintah daerah

Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi berbagai upaya penanggulangan anak putus sekolah. Pemerintah Kabupaten Buton bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pendidikan daerah, menyediakan dukungan program pendidikan, serta memastikan bahwa setiap anak usia sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan sebagai penggerak utama dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dinas pendidikan, sekolah, serta masyarakat. Melalui kebijakan dan program pendidikan yang dijalankan, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Buton. Peran ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan anak putus sekolah.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan program pendidikan. Upaya

tersebut bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan anak serta mengurangi angka putus sekolah di daerah tersebut.

b) Koordinasi dinas pendidikan

Dinas pendidikan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai program penanggulangan anak putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas pendidikan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan serta masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program pendidikan.

Koordinasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan meliputi pendataan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, pelaksanaan program bantuan pendidikan, serta kerja sama dengan sekolah dalam memastikan bahwa siswa yang berisiko putus sekolah dapat tetap melanjutkan pendidikan. Melalui koordinasi yang baik, berbagai program pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terintegrasi.

Selain itu, dinas pendidikan juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan anak putus sekolah, sehingga setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Koordinasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

4. Proses interaksi antar stakeholder

Dalam kerangka collaborative governance, proses kolaborasi merupakan inti dari kerja sama antar aktor dalam menyelesaikan permasalahan publik. Proses ini melibatkan interaksi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini, proses interaksi antar stakeholder dalam penanggulangan anak putus sekolah di Kabupaten Buton dapat dilihat melalui dua aspek utama, yaitu dialog antar stakeholder dan implementasi program kolaborasi.

a) Dialog antar stakeholder

Penelitian menunjukkan bahwa dialog antar stakeholder menjadi salah satu mekanisme penting dalam membangun kolaborasi dalam penanggulangan anak putus sekolah. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti sekolah, perangkat desa, serta masyarakat, untuk membahas permasalahan pendidikan yang terjadi di wilayah tersebut.

Dialog ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti rapat koordinasi, sosialisasi program pendidikan, serta pertemuan dengan pihak sekolah dan masyarakat. Melalui dialog tersebut, berbagai pihak dapat menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses komunikasi ini juga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang penting dalam upaya mengidentifikasi anak-anak yang berisiko putus sekolah maupun yang telah berhenti sekolah.

Selain itu, dialog antar stakeholder juga berfungsi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai pentingnya pendidikan serta memperkuat komitmen berbagai pihak dalam mendukung program penanggulangan anak putus sekolah. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, hubungan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat terjalin dengan lebih baik.

b) Implementasi program kolaborasi

Proses kolaborasi tidak hanya berhenti pada tahap dialog, tetapi juga diwujudkan melalui implementasi berbagai program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan sekolah dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk menekan angka anak putus sekolah.

Implementasi program kolaborasi dilakukan melalui kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta upaya mendorong anak-anak yang telah putus sekolah untuk kembali melanjutkan

pendidikan. Sekolah juga berperan aktif dalam memantau kondisi siswa dan memberikan informasi kepada dinas pendidikan apabila terdapat siswa yang berisiko putus sekolah.

Selain itu, masyarakat turut berperan dalam mendukung keberhasilan program tersebut dengan memberikan informasi kepada pemerintah maupun pihak sekolah mengenai anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Keterlibatan masyarakat ini menunjukkan bahwa penanggulangan anak putus sekolah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi berbagai pihak.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan anak putus sekolah di Kabupaten Buton memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi terbentuknya kolaborasi dalam upaya mengatasi permasalahan anak putus sekolah.

Pertama, kondisi awal yang memicu kolaborasi dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan sebagian anak tidak mampu melanjutkan pendidikan, sementara kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur pendidikan juga menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mengakses sekolah. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan formal bagi masa depan anak.

Kedua, aturan dan mekanisme kolaborasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan upaya penanggulangan anak putus sekolah. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan telah merumuskan berbagai kebijakan pendidikan yang mengacu pada program wajib belajar serta melaksanakan berbagai program penanganan anak putus sekolah. Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, serta didukung oleh mekanisme koordinasi antar lembaga yang memungkinkan pelaksanaan program berjalan secara lebih terintegrasi.

Ketiga, kepemimpinan yang memfasilitasi kolaborasi berperan penting dalam menggerakkan berbagai pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator yang mendorong terbentuknya kerja sama antar stakeholder, sementara dinas pendidikan berperan dalam mengoordinasikan berbagai program pendidikan serta menjembatani komunikasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Keempat, proses interaksi antar stakeholder menjadi inti dari pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan anak putus sekolah. Proses ini diwujudkan melalui dialog antar stakeholder serta implementasi program kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Melalui komunikasi yang intensif dan kerja sama yang berkelanjutan, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat bersama-sama mengidentifikasi permasalahan pendidikan serta melaksanakan berbagai program untuk menekan angka anak putus sekolah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan anak putus sekolah di Kabupaten Buton telah berjalan melalui keterlibatan berbagai aktor dan mekanisme kerja sama yang terkoordinasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses pendidikan serta mengurangi angka anak putus sekolah di daerah tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Buton dalam penanggulangan anak putus sekolah melalui pendekatan *collaborative governance*, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Buton diharapkan dapat terus memperkuat kebijakan dan program pendidikan yang berorientasi pada peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas



pendidikan, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis, serta memperluas program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu agar faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghambat bagi anak untuk melanjutkan pendidikan.

Kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Buton perlu meningkatkan efektivitas sistem pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) secara berkala dan terintegrasi. Pendataan yang akurat dan berkelanjutan akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mempermudah pelaksanaan program penanganan anak putus sekolah di setiap wilayah.

Ketiga, sekolah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi siswa yang berpotensi mengalami putus sekolah. Sekolah juga perlu meningkatkan komunikasi dengan orang tua dan masyarakat agar dapat segera mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi siswa serta mencari solusi bersama untuk mencegah terjadinya putus sekolah.

Keempat, masyarakat dan orang tua diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial sangat berperan dalam mendorong anak untuk tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi collaborative governance dalam sektor pendidikan dengan menggunakan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami strategi penanggulangan anak putus sekolah di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yaneri, Nike Vonika, V. S. (2022). Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Miskin di Kampung Lio Kota Depok). *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 4(1), 76–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/lindayasos.v24i1>
- Almas Ressel Ulia, Salahudin Rayyan, E. R. (2024). Government Efforts To Overcome Economic Inequalities In Society By Redistributing National Income. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 1(10), 8090–8099. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2108>
- Anam, K., & Wiyono, B. B. (2025). Transformasi Pendidikan Melalui Sekolah Berpola Asrama Gratis untuk Menekan Angka Putus Sekolah di Papua Selatan. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(4), 6619–6634. <https://jurnaldidaktika.org/contents>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Awaluddin. (2021). Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Sekolah. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(2). <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/issue/view/20>
- Dince Putri Juita, Priya, Mayang Azwardi, A. A. (2024). Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Pendidikan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3068–3077. <https://doi.org/https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3>
- Endang Susilawati, Getar Rahmi Pratiwi, I. A. (2021). Peran pendidikan dalam kemajuan peradaban bangsa. *Prosiding Seminar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 62–76. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojip/index.php/op/article/view/3941>
- Endry Setiawan, Ninik Handayani, Ranto Setiyono, Hermansyah, Ahmad, W. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan Endry. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i3.1200>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>



- Jeni Suharti, H. (2025). Pentingnya Pendidikan Sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 03(02), 593–596. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/issue/view/41>
- Khairunnisa, A. T. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 63–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jkpp.v6i1.11528>
- Limbong, S., Purnomo, A., & Halik, W. (2025). Strategi Pemerintah Kota Sorong Dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah. *Jurnal Maladum*, 3(1), 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jm.v3i1>
- Luci Dian Andayani, Muhamad Yusuf, Mambang, N. R. T. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Ats) Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. *Pencerah Publik*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/pencerah.v8i2>
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia : Rekomendasi Kebijakan yang Efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3>
- Mochamad Taufik Nurul Hidayat, Ade Irfan Abdurrahman, A. S. (2024). Strategi Sosialisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Pelajar SMP di Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(April), 665–689. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.11112264>
- Muhammad Ghoris Arkan Mahasina, Endin Mujahidin, N. A. (2025). Pendekatan Sistematis dalam Perencanaan Jaminan Mutu Pendidikan: Studi Kasus di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 28–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i1>
- Muhammad Yasin, Akhmad Rifansyah, N. N. Y. (2024). Pendidikan Terhadap Ketimpangan Ekonomi : Studi Kasus Tentang Peran Pendidikan Dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial di SD Al- Ba ' yah Bengalon. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(7), 542–549. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM>
- Noerdars, A. P. I. L. (2025). Kondisi Psikologis Remaja Yang Putus Sekolah Di Banyuwangi. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 12(2), 883–894. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.26740/cjpp.883-894>
- Norul Hikmah, C. M. (2025). MANUSIA DAN PENDIDIKAN: Manusia Sebagai Makhluk Yang Bisa Dididik Dan Manusia Sebagai Makhluk Yang Perlu Dididik. *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 1(2), 9–24. <https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/almidad/article/view/52>
- Nurul Hasana Aswar, Ahmad Mustanir, B. (2025). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Desa Kalosi Alau Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2), 1044–1057. <https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6694>
- Nurul Jannah, Aswasulasikin, S. (2025). Analisis Faktor-faktor Penyebab Tingginya Angka Putus Sekolah (Studi Kasus di Desa Tanjung Baru Petai , Ogan Ilir). *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 531–544. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4134>
- Risman Setiawan, Lade Sirjon, Fuad Nur, La Ode Muhamad Sulihin, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli, Arfa, L. O. M. K. D. (2025). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 387–395. <https://doi.org/org/10.63822/4tw3p411> Vol.
- Setyawan, D. (2025). Membangun Generasi Emas: Peran Pendidikan Dalam Membentuk Masa Depan Bangsa. *Jurnal Pembelajaran, Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan*, 1(1), 1–9. <https://artmediapub.id/index.php/JPKTP/article/view/66>
- Supriarno. (2024). Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Meningkatkan Pendidikan di Indonesia untuk Menuju Generasi Emas. *Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Pendidikan*, 4(3), 438–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.28926/jpip.v4i4.1806>
- Supriatna, E. (2023). Inisiatif Partisipasi Sosial Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah: Studi Kasus



- Pada Jaringan Kerja Dan Kolaborasi Antara Lembaga Pemerintah, LSM, Dan Masyarakat Sipil Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3), 273–289. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2196>
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 125–131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>
- Wulandari, E., Devi, I. S., Azis, A., Islam, F. A., Studi, P., Agama, P., & Karawang, S. (2025). Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.900>.